



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselfprov.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 020/SK/DINKES/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Prov. Sumsel;
13. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);
14. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Bab V Penutup

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah

dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 November 2025

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan,** }



dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707
Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
NOMOR : 021 / SK / KES / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG**
- a. Bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan Penyusunan Renja Tahun 2026 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuknya Tim Penyusunan Renja 2026.
 - b. Bahwa Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- MENGINGAT**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
17. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);
18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 055/SK/DINKES/2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjukkan Personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja Tahun 2026 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Kedua** : Kepada Personil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Renja 2026.
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Di Palembang
Pada Tanggal : 28 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN }


dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 021/SK/KES/II/2025
Tanggal : 28 November 2025

**Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan

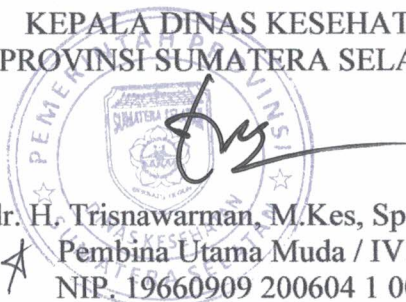
Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Subbagian Keuangan
7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
14. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Kepala Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi
16. Kepala Seksi Kefarmasian
17. Kepala Seksi Alat Kesehatan
18. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
19. Syifa Amandasari, S.AB
20. Iku Girihendari, SKM
21. Sari Apriany, S.S.T

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenanNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di dalamnya berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Pagu Indikatif yang di butuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2026, yang diuraikan berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang dan regular.

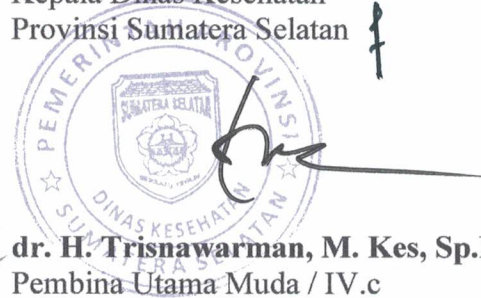
Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dan akhir kata semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 28 November 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	 7
2.1 Kondisi Umum SKPD	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola	10
2.2 Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah Tahun Lalu	16
2.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	16
2.2.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.....	22
2.2.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	29
2.2.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	31
2.2.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.....	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	33
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	33
2.3.2 Isu-Isu Strategis	37
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN	 39
3.1 Sasaran Strategis	39
3.2 Program dan Kegiatan	39
3.3 Indikator Sasaran	40
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 49
4.1. Rencana Program	49
 BAB V PENUTUP	 61
Penutup	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kesehatan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Kesehatan 2026 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Kesehatan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memuat program, kegiatan, subkegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Kesehatan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Kesehatan; pembahasan Rancangan Renja Dinas Kesehatan; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan untuk tahun pertama periode Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dalam bentuk penjabaran program, kegiatan dan Subkegiatan tahunan. Renstra dan Renja Dinas Kesehatan harus mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 terkait dengan bidang kesehatan adalah Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui Revitalisasi Sarana & Tenaga Kesehatan (Puskesmas, Poskesdes, Pondok Bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Toga, Kadarzi, Prilaku Hidup Sehat), Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri. Membangun Prilaku masyarakat Hidup Sehat secara partisipatif dan Pembentukan Program Kesehatan Kewilayahan (Desa/Kelurahan Sehat).

Subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 adalah :

- 1) Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 2) Subkegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
- 3) Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 4) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak;
- 5) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- 6) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- 7) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 8) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- 9) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 10) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
- 11) Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan;
- 12) Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 13) Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
- 14) Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
15. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
16. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);
17. Keputusan Gubernur Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan laporan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Pendahuluan
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU
	2.1 Kondisi Umum SKPD
	2.2 Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah Tahun Lalu
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
	3.1 Sasaran Strategis
	3.2 Program
	3.3 Indikator Sasaran
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
	4.1 Rencana Program
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Kondisi Umum SKPD

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.1 Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 4, maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

2.1.1.2 Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2017, Fungsi Dinas Kesehatan adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan dibawah ini :



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS

dr.H.TRISNAWARMAN,M.Kes,Sp.KKLP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196609092006041008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Oktober 2024

SEKRETARIS

H. FERY FAHRIZAL, SKM, M.KM
NIP. 196802191990031001 (IV/b)

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN**

EKA ASHARI, SKM, M. Kes
NIP. 198201112005011004 (IV/a)

**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET**

SUCIATI, SE, M.Si
NIP. 196902031992032005 (IV/a)

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

EDWIN YULIUS,SKM.M.Si
NIP. 196907231993031003 (IV/a)

**KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT**

DEDY IRAWAN, SKM., M.KM.
NIP. 198202152005011003 (IV/b)

**KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

IRA PRIMADESA OGATIAH, S.Si., M.Kes
NIP. 19741218 2003122 004 (IV/b)

**KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN**

dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.
NIP. 197604062009022004 (IV/b)

**KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN**

dr. H. ICON HARIZON, M.KM
NIP. 198407032009021004 (IV/b)

**KEPALA SEKSI
KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
MASYARAKAT**

dr. LISA MARNIYATI, M.KM.
NIP. 198203102006042008 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
SURVEILANS DAN IMUNISASI**

Ns. H. DARSONO, S.Kep, M. Kes
NIP. 197512091995031001 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN
TRADISIONAL**

dr. UKE VERONIKA
NIP. 197802232006042012 (III/d)

**KEPALA SEKSI
KEFARMASIAN**

INDRA GUNAWAN, SKM., M.Si
NIP. 197208241996031003 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

H.IMAM SUBROTO, SKM., M.Kes.
NIP. 197610071996031001 (IV/a)

**Pt. KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR**

MARSAL HUSNAN, SKM, M. Kes
NIP.198109092009021003 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM., M.Kes.
NIP. 198102272005011005 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
ALAT KESEHATAN**

TERRY SUCIATI NINGRUM, ST., M.Si.
NIP. 197406061998032003 (IV/a)

**Pt. KEPALA SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN
KERJA DAN OLAHRAHA**

HERMANSYAH, SKM.
NIP. 196807111992031005 (III/d)

**KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA**

dr. Hj. SARI NAZLIYATI PUTRI, M.KM
NIP. 19830629010012015 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
FASYANKES DAN MUTU AKREDITASI**

SARI APRIYANI,S.Kep,M.Kes
NIP. 198204042009022011 (III/c)

**KEPALA SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

YUSNITA SATYAFITRI, SKM., M.M.
NIP. 197506061999032002 (IV/a)

**UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS**

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dr.H.TRISNAWARMAN,M.Kes,Sp.KKLP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660909 200604 1 008

2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

2.1.2.1 Susunan Kepegawaian

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD sampai akhir tahun 2024 sebanyak 1.423 orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Institusi	Golongan Kepegawaian																Jumlah	
		Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		X		IX		VII		VIII			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Dinas Kesehatan	21	33	28	124	6	18	0	0	0	1	2	3	2	3	0	0	59	182
2	Bapelkes	2	8	5	15	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	23
3	RS. Ernaldi Bahar	18	68	35	113	15	36	0	0	2	4	8	2	1	15	0	0	79	238
4	RSK Mata Masyarakat	4	8	5	62	9	20	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	18	98
5	RSK Gigi dan Mulut	2	13	6	49	9	24	0	0	0	5	0	1	4	24	0	0	21	116
6	RSUD Siti Fatimah	15	38	49	140	22	65	0	0	18	62	1	25	36	105	1	0	142	435
TOTAL		62	168	128	503	65	163	2	0	20	72	11	31	43	151	1	0	331	1092
SUB TOTAL																		1423	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah golongan III sebanyak 631 orang atau sebesar 57,89%, kemudian golongan IV sebesar 21,10% (230 orang), golongan II sebesar 20,92% (228 orang) dan golongan I sebesar 0,18% (2 orang). Tapi dilihat dari responsive gender jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki seperti dari keseluruhan Gol. III jumlah perempuan lebih banyak 503 orang (79,71%) sedangkan laki-laki sebanyak 128 orang (20,29%) dan Gol. IV perempuan lebih banyak sebanyak 168 orang (73,04%) sedangkan laki-laki 62 orang (26,95%).

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Institusi	Tingkat Pendidikan												Jumlah	
		S3 / S2		S1		D4		D3		SLTA		SLTP			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Dinas Kesehatan	28	58	17	82	0	3	7	39	7	0	0	0	59	182
2	Bapelkes	2	16	1	3	0	1	0	0	2	0	4	0	16	19
3	RSK Ernaldi Bahar	17	46	30	103	3	8	20	80	9	1	0	0	79	238
4	RSK Mata Masyarakat	3	13	5	39	1	3	7	35	2	0	0	0	18	98
5	RSK Gigi dan Mulut	0	11	5	44	1	0	14	61	1	0	0	0	21	116
6	RSUD Siti Fatimah	26	69	33	119	1	0	81	237	1	1	0	0	142	435
TOTAL		76	213	78	311	3	24	68	285	38	2	4	0	335	1088
SUB TOTAL														1423	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Sebagian besar pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 (389 orang) atau sekitar 35,69%, Diploma 3 sebesar 32,39% (353 orang), S3/S2 sebesar 26,51% (289 orang), SMA sebesar 3,67% (40 orang), Diploma 4 sebesar 2,48% (27 orang). Tapi dilihat dari responsive gender jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki terlihat Sarjana S1 perempuan sebanyak 311 orang (79,95%) dibandingkan laki-laki 78 orang (20,05%), Diploma 3 perempuan sebanyak 285 orang (80,74%) dibandingkan laki-laki sebanyak 68 orang (19,26%).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membawahi Kelompok Jabatan fungsional. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jabatan	Dinkes		Bapelkes		RSK Mata Masyarakat		RSK Gigi dan Mulut		RSUD Siti Fatimah		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
A	FUNGSIONAL KHUSUS												
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0	2	6	0	2	7	22	9	30
2	Dokter	1	10	0	0	1	6	1	8	13	35	16	59
3	Dokter Gigi	1	0	0	0	0	0	1	16	0	3	2	19
4	Dokter Gigi Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
5	Perawat	0	25	0	0	7	48	7	23	69	193	83	289
6	Perawat Gigi	1	2	0	0	0	0	4	28	1	3	6	33
7	Bidan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	33	0	35
8	Penyuluh Kesehatan	6	10	0	0	0	1	1	2	0	7	7	20
9	Sanitarian	2	2	0	0	0	1	0	2	1	4	3	9
10	Epidemiologi	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
11	Administrator Kesehatan	5	43	0	6	0	2	0	6	1	14	6	71
12	Pranata Laboratorium	1	0	0	0	0	4	1	1	3	15	5	20
13	Apoteker	0	1	0	0	1	2	1	4	3	14	5	21
14	Asisten Apoteker	1	10	0	0	0	2	0	6	4	24	5	42
15	Refrak Option	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4
16	Fisioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3
17	Nutrisionis	1	4	0	0	0	1	0	3	1	13	2	21
18	Elektromedik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medik	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	1	11
20	Radiografer	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	5	13
21	Widyaiswara	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	2	3
22	Pustakawan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

No	Jabatan	Dinkes		Bapelkes		RSK Mata Masyarakat		RSK Gigi dan Mulut		RSUD Siti Fatimah		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
23	Penyuluh Kesehatan Kerja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Analisis Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
25	Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
26	Entomolog	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
27	Anastesi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
28	Asisten Anastesi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1
29	Arsiparis	0	0	0	0					1	1	1	1
30	Terapi Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	Okupasi Terapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
B	FUNGSIONAL UMUM	24	45	9	10	5	11	0	2	16	9	54	77
C	STRUKTURAL (ESELON)	12	9	1	3	2	2	1	2	17	15	33	31
TOTAL		60	176	12	23	18	90	19	118	148	429	257	836

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: fungsional khusus dan fungsional umum. Pegawai fungsional khusus sebanyak 898 orang dengan 31 kriteria jabatan fungsional khusus, sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 131 orang. Selain jabatan fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD memiliki 64 pejabat struktural.

Jabatan fungsional khusus yang banyak terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD antara lain perawat 372 orang (41,43%), administrator kesehatan 77 orang (8,57%) dan dokter 75 orang (8,35%), tapi dari responsive gender perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu perempuan 728 orang (81,07%) dibandingkan laki-laki 170 orang (18,93%). Dengan lebih banyak perawat perempuan sebanyak 289 orang (77,69%) dibanding laki-laki

sebanyak 83 orang (22,31%), fungsional umum perempuan sebanyak 77 orang (58,78%) dibanding laki-laki sebanyak 54 orang (41,22%) dan administrator kesehatan perempuan sebanyak 71 orang (92,21%) dibandingkan laki-laki sebanyak 6 orang (7,79%).

2.1.2.2 Aset yang Dikelola

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset berupa tanah, Gedung, serta peralatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	3.095.541.283.914,98
1	TANAH	846.531.251.665,39
101	TANAH	846.531.251.665,39
2	PERALATAN DAN MESIN	949.381.392.553,32
2.01	ALAT BESAR	10.946.469.593,40
2.02	ALAT ANGKUTAN	52.547.522.385,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	8.675.337.884,80
2.04	ALAT PERTANIAN	1.766.659.196,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	134.011.959.027,62
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	9.573.987.102,94
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	644.531.307.954,01
2.08	ALAT LABORATORIUM	42.197.840.269,52
2.09	ALAT PERSENIJAAN	87.926.600,00
2.10	KOMPUTER	33.599.979.909,84
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	5.415.194.097,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	11.855.133,00
2.18	RAMBU - RAMBU	58.010.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	957.342.600,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.124.002.497.215,28
3.01	BANGUNAN GEDUNG	1.111.427.956.48,82
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	7.293.037.500,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5.281.503.301,46
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	38.750.488.320,11
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	91.064.000,00
4.02	BANGUNAN AIR	349.236.600,00
4.03	INSTALASI	10.886.821.745,00
4.04	JARINGAN	27.423.365.975,11
5	ASET TETAP LAINNYA	29.935.840,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	29.935.840,00
5.02	BARANG BERCORAK Kesenian/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN	136.845.718.320,88
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN	136.845.718.320,88
1.5	ASET LAINNYA	23.692.475.553,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	19.992.480.553,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	19.992.480.553,00
4	ASET LAIN-LAIN	3.699.995.000,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	3.699.995.000,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

2.2 Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah Tahun Lalu

Pada tahun 2024 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 5 program 18 kegiatan dan total sub kegiatan sebanyak 61 jenis. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024 semula adalah sebesar Rp 195.111.165.720,00 dalam APBD Induk dan mengalami perubahan menjadi Rp 467.820.630.113,00 pada APBD Perubahan dan terealisasi sebesar Rp 454.332.452.514 atau sebesar 97,12 persen untuk realisasi keuangan dan 100 persen untuk realisasi fisik.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

2.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.2.1.1 Pelaksanaan Program

Total anggaran pada program pelayanan dan administrasi perkantoran ini sebesar Rp 201.488.486.906,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2024 mencapai Rp 195.636.635.762,00 (97,10%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 461.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 393.520.586,00 (85,36%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp 170.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 147.618.190,00 (86,58%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output

kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebanyak 3 laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 164.685.893.570,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 163.632.598.475,00 (99,36%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - a) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp 163.800.653.570,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 162.794.130.285,00 (99,39%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah bulan pegawai ASN yang dibayar gaji selama 13 bulan/758 orang.
 - b) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp 714.740.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 690.850.000,00 (96,66%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah dokumen hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen.
 - c) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp 170.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 147.618.190,00 (86,58%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebanyak 1 laporan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 1.183.367.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 970.057.771,00 (81,97%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 348.850.000,00 (99,67%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 1 paket.
 - b) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp 443.247.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 397.985.664,00 (89,79%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah karyawan Dinkes dan UPT yang di tingkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus singkat dan pelatihan sebanyak 300 orang.
 - c) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp 390.120.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 223.222.107,00 (57,22%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 234 orang.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 2.564.299.250,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 2.381.715.227,00 (92,88%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah sebagai berikut :
- a) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp 169.441.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 168.261.700,00 (99,30%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 3 paket.
 - b) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp 279.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar

- Rp 276.821.000,00 (99,22%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah paket peralatan rumah tangga yang diadakan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 2 paket.
- c) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp 475.858.250,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 433.084.400,00 (91,01%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah bahan logistik kantor sebanyak 5 paket.
 - d) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp 196.250.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 405.197.500,00 (96,53%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah paket bahan cetak (formulir, blanko, buku, kartu) dan pengadaan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 4 paket.
 - e) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp 12.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 4.122.000,00 (32,98%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 dokumen.
 - f) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.075.633.107,00 (89,64%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.
 - g) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp 231.250.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 229.783.000,00 (99,37%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah website Dinkes yang menyediakan data informasi publik lebih aman sebanyak 1 website.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 3.170.0466.950,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 3.061.641.950,00 (96,57%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a) Subkegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp 694.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 623.575.000,00 (89,79%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 1 paket.
 - b) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 2.123.658.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 2.085.758.000,00 (98,22%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan sebanyak 1 unit.
 - c) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 352.308.950,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 352.308.950,00 (100%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak 1 unit.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 10.915.113.576,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 10.113.954.189,00 (92,66%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:
- a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp 12.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar

Rp 3.395.000,00 (27,16%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 2 laporan.

b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp 2.542.600.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 2.387.906.549,00 (93,92%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 3 laporan.

c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 8.360.013.576,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 7.722.652.640,00 (92,38%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah laporan jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 8 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 15.013.846.060,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 12.431.834.201,00 (82,80%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp 1.698.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.612.098.161,00 (94,94%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan perawatan bagi Dinkes dan UPT sebanyak 100 Unit Kendaraan.

b) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 12.862.546.060,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 10.371.978.040 (80,64%), dan

realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah gedung kantor Bapelkes dan Ex-BKOKM yang dilakukan rehabilitas gedung sedang/berat sebanyak 1 gedung kantor.

- c) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 453.300.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 447.758.000,00 (98,78%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala sebanyak 1 unit.

- 8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp 3.214.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 2.548.870.288,00 (79,29%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD adalah sebagai berikut :

- a) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp 3.214.500.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 2.548.870.288,00 (79,29%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah unit kerja BLUD dalam meningkatkan mutu pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

2.2.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.2.2.1 Pelaksanaan Program

Total anggaran pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ini sebesar Rp 263.897.587.207,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2024 mencapai Rp 256.551.972.550 (97,22%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 15.466.654.781,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 15.300.177.341 (98,92%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase rumah sakit UPT Dinas Kesehatan yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai standar sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :
 - a) Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi, dengan anggaran sebesar Rp 148.739.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 136.769.600,00 (91,95%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintence center yang disediakan dan dipelihara sebanyak 1 unit.
 - b) Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 747.721.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 712.962.782,00 (95,35%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya sebanyak 10 dokumen.
 - c) Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 14.570.193.781,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 14.450.444.959 (99,18%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah paket obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya sebanyak 3 paket.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 247.467.992.426,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar

Rp 240.523.244.110,00 (97,19%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah angka kematian bayi sebesar 15/1000 kelahiran hidup. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, dengan anggaran sebesar Rp 926.250.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 619.527.499,00 (66,89%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang memperoleh pelayanan kesehatan sebesar 100 persen.
- b) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan anggaran sebesar Rp 570.176.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 68.479.100,00 (12,01%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah kabupaten/kota yang dilakukan asistensi terpadu pelaksanaan EWARS dan teknis surveilans PD3I sebanyak 17 Kab/Kota.
- c) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan anggaran sebesar Rp 1.269.834.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.195.730.609,00 (94,16%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebanyak 7 dokumen.
- d) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, dengan anggaran sebesar Rp 40.010.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 33.895.000,00 (84,72%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sebanyak 1 dokumen.
- e) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan anggaran sebesar Rp 40.760.000,00 dengan realisasi anggaran

- keuangan sebesar Rp 34.337,00 (84,24%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut sebanyak 2 dokumen.
- f) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 7.530.148.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 7.341.567.296,00 (97,50%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sebanyak 10 dokumen.
 - g) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan anggaran sebesar Rp 1.114.040.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 940.354.705,00 (84,41%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 8 dokumen.
 - h) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp 545.255.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 468.162.662,00 (85,86%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sebanyak 8 dokumen.
 - i) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 206.330.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 188.690.000,00 (91,45%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan sebanyak 1 dokumen.
 - j) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 118.545.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 107.787.500,00 (90,93%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya sebanyak 1 dokumen.

- k) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan anggaran sebesar Rp 1.867.142.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.669.282.814,00 (89,40%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sebanyak 19 dokumen.
- l) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, dengan anggaran sebesar Rp 89.482.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 85.774.488,00 (95,86%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji sebanyak 2 dokumen.
- m) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dengan anggaran sebesar Rp 151.861.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 150.897.265,00 (99,37%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) sebanyak 3 dokumen.
- n) Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 227.434.066.426,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 222.467.365.770,00 (97,82%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 5 dokumen.
- o) Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 798.286.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 718.813.852,00 (90,04%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan sebanyak 6 dokumen.
- p) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 70.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 65.567.781,00 (93,67%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil Koordinasi dan

sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen.

- q) Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 140.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 120.784.792,00 (86,27%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan sebanyak 7 dokumen.
- r) Subkegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp 374.178.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 373.856.000,00 (99,91%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas dan registrasi puskesmas sebanyak 1 dokumen.
- s) Subkegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 207.150.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 195.430.000,00 (94,34%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota sebanyak 6 dokumen.
- t) Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan anggaran sebesar Rp 490.954.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 389.965.590,00 (79,43%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu SPGDT sebanyak 1 unit.
- u) Subkegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas pelayanan kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 3.450.038.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 3.254.166.887,00 (94,32%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah

tersedianya dokumen hasil pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas pelayanan Kesehatan sebanyak 3 dokumen.

- v) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp 33.485.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 32.807.500,00 (97,98%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Kesehatan Puskesmas sebanyak 85 keluarga.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 18.223.519,00 (30,37%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi adalah sebagai berikut:
- a) Subkegiatan Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 18.223.519,00 (30,37%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan sebanyak 3 dokumen.
4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 902.940.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 710.327.580,00 (78,67%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi adalah sebagai berikut :
- a) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 90.560.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 67.875.580,00 (97,31%), dan realisasi fisik

sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah rumah sakit kelas B yang dilakukan viitasi terkait pemberian izin operasional rumah sakit sebanyak 65 RS.

- b) Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp 515.950.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 404.283.000,00 (88,56%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah RS yang dibina pelaksanaan SIMRS dan SISROUTE sebanyak 65 RS dan jumlah rumah sakit yang dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 65 RS.
- c) Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 296.430.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 238.169.000,00 (80,35%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan akreditasi klinik dan DPM sebanyak 17 kab/kota dan jumlah labkesda kab/kota yang dilakukan pembinaan sesuai standard sebanyak 8 laboratorium.

2.2.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.2.3.1 Pelaksanaan Program

Total anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ini sebesar Rp 492.831.500,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2024 mencapai Rp 430.609.492,00 (87,37%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 89.428.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 86.862.723,00 (97,13%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 42.040.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 40.607.030,00 (96,59%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 100 orang.
 - b) Subkegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 47.388.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 46.255.693,00 (97,61%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Jumlah dokter internsip dan dokter pendamping yang dibina sebanyak 150 orang.
2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 403.403.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 343.746.769,00 (85,21%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebesar 100%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi adalah sebagai berikut:
- a) Subkegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 51.113.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 44.293.475,00 (86,66%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan sebanyak 1 dokumen.
 - b) Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 352.290.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 299.453.294,00 (85%), dan

realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan sebanyak 1 dokumen.

2.2.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

2.2.4.1 Pelaksanaan Program

Total anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman ini sebesar Rp 118.284.500,00 dengan realisasi keuangannya pada tahun 2024 mencapai Rp 87.773.772,00 (74,21%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dengan anggaran sebesar Rp 118.284.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 87.773.772,00 (74,21%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase sarana penyalur alat kesehatan yang memenuhi syarat cara distribusi alat kesehatan yang baik sebesar 50%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) adalah sebagai berikut :
 - a) Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK, dengan anggaran sebesar Rp 118.284.500,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 87.773.772,00 (74,21%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK sebanyak 2 dokumen.

2.2.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2.2.5.1 Pelaksanaan Program

Total anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ini sebesar Rp 1.823.440.000,00 dengan realisasi keuangannya pada

tahun 2024 mencapai Rp 1.625.460.938,00 (89,14%) serta dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 720.390.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 539.152.000,00 (74,84%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase posyandu aktif purnama dan mandiri sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi adalah sebagai berikut :
 - a) Subkegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 720.390.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 539.152.000,00 (74,84%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi sebanyak 14 dokumen.
2. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp 1.103.050.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.086.308.938,00 (98,48%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah persentase desa siaga aktif purnama dan mandiri sebesar 90%. Subkegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi adalah sebagai berikut:
 - a) Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran sebesar Rp 1.103.050.000,00 dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.086.308.938,00

(98,48%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebanyak 1 dokumen.

Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut dalam administrasi kegiatan tersebut antara lain:

1. Kendala

- a) Pengaturan proses pencairan GU dan LS yang belum terstandar; dan
- b) Adanya kendala dalam pemanfaatan aplikasi SIPD yang tidak sinkron antara data penatausahaan dan LRA sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan konsolidasi program.

2. Tindak Lanjut yang Diperlukan

- a) Proses pencairan GU dan LS dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku; dan
- b) Koordinasi perihal aplikasi SIPD dengan Pusdatin Kemendagri selaku IT dan BPKAD selaku koordinator di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Dengan Identifikasi atas dinamika eksternal yang tepat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang

mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam mendukung pencapaian SPM, diantaranya :

- a) Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - SPM, Pelayanan Krisis Kesehatan Akibat bencana hanya berlaku di Provinsi sehingga mengalami kesulitan bagi kabupaten/kota untuk mengusulkan kegiatan penanganan krisis kesehatan di kabupaten/kota;
 - Petugas dan pengelola program krisis kesehatan ditingkat puskesmas dan ditingkat pelayanan di rumah sakit belum mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan/penanggulangan krisis kesehatan dan penanganan korban krisis bencana;
 - Upaya pembinaan pada masyarakat terdampak/beresiko bencana belum dilakukan secara maksimal hanya dilakukan pada saat terjadi bencana dan pasca bencana saja;
 - Pelatihan/peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko krisis kesehatan di daerah rawan bencana hanya dilakukan 10 kali/lokasi/desa pada tahun 2024, ini hanya 0.3% dari jumlah desa di Provinsi Sumatera Selatan (jumlah 3.270 desa, BPS tahun 2023).
- b) Persentase Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar;
 - Semua penderita pada KLB tahun 2024 yaitu sebanyak 156 orang (100%) telah mendapat respon dan pelayanan kesehatan > 24 jam dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik itu puskesmas maupun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dalam mendukung pencapaian penanganan stunting :
 - a) Ketersediaan Pangan berkualitas di rumah tangga turun karena hilangnya pekerjaan;
 - b) Kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil dan anak saat masa pertumbuhan;
 - c) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta jamban;
 - d) Posyandu tidak jalan optimal;
 - e) Kunjungan balita sakit ke Nakes/ Faskes turun;
 - f) Kunjungan ibu hamil untuk ANC ke Puskesmas kurang optimal; pemeriksaan, Tekanan Darah bumil, edukasi; resiko BBLR, PBLR dan Prematur.
3. Permasalahan Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi :
 - a) Persyaratan dalam pembuatan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sulit dipenuhi karena standar yang diberikan terlalu tinggi.
 - b) Seringnya terjadi pergantian petugas pengelola program baik di Kabupaten/Kota maupun Puskesmas
 - c) Komitmen kepala daerah dalam kegiatan program belum maksimal
 - d) Belum maksimalnya pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah
 - e) Program PHBS tidak menjadi program prioritas kementerian RI dan hanya beberapa kabupaten/kota yang menjadikan program PHBS sebagai salah satu indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - f) Kebijakan terkait pembinaan PHBS ada (berdasarkan Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011) tetapi belum tersosialisasi secara menyeluruh sampai ke desa/kelurahan/rumah tangga.
4. Permasalahan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit :
 - a) Kurangnya komitmen antar lintas sektoral, pelaksana pelayanan, dan pendanaan untuk operasional serta sarana dan prasarana dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit;
 - b) Masih banyak pasien menolak pengobatan di Fasilitas Kesehatan dan memilih pengobatan alternatif;

- c) Implementasi 3M plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di kab/Kota belum optimal;
 - d) Klasifikasi kasus belum dilakukan dengan analisa mendetail dengan memperhatikan berbagai aspek;
 - e) Belum optimalnya koordinasi dengan lintas program (KIA dan Promkes) untuk mendukung peningkatan capaian;
 - f) Rotasi petugas ditingkat puskesmas yang masih tinggi dan didukung dengan tidak adanya kaderisasi yang baik kepada petugas yang baru;
 - g) Kurangnya pemantauan cakupan program secara berjenjang hingga ke tingkat puskesmas/posyandu.
5. Permasalahan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi :
- a) Keterbatasan dana dalam pendampingan, workshop dan survey akreditasi;
 - b) Kelengkapan dalam pengisian data alat kesehatan seperti Nomor seri / No inventaris, Merk, Type, No AKD/AKL, belum sesuai dengan Alkes yang ada;
 - c) Jumlah dan kompetensi tenaga kefarmasian di puskesmas masih terbatas;
 - d) Kesiapan dari penyedia obat untuk memenuhi kebutuhan obat di puskesmas tidak sesuai dengan rencana kebutuhan
 - e) Kemudahan perizinan berusaha yang membuat pelaku usaha tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan persyaratan sesuai CPAKB dan CDAKB.
6. Permasalahan Pembinaan Kesehatan Masyarakat :
- a) Kompetensi dan kepatuhan petugas (bidan) dalam memberikan asuhan kesehatan terutama pada masa hamil (ANC) yang belum sesuai standar;
 - b) Keterbatasan jumlah USG di FKTP sehingga skrining masalah pada kehamilan masih belum optimal;
 - c) Masih ada persalinan yang dilakukan tidak di fasyankes dan pertolongan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan;
 - d) Masih ada penolakan rujukan dari ibu bersalin dan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit;

- e) Kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas belum standar untuk memberikan pelayanan MKJP;
 - f) Sarana dan prasarana yang tidak memadai di fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi secara lengkap.
7. Permasalahan Sumber Daya Kesehatan
- a) Secara keseluruhan puskesmas yang memenuhi keseluruhan tenaga kesehatan (9 Nakes) pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2020, masih banyak puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan terutama tenaga Dokter Gigi dan Tenaga ATLM (Ahli Teknik Laboratorium Medis);
 - b) Mengusulkan dokter/dokter gigi untuk mengikuti tugas belajar dengan pembiayaan LPDP Kemenkeu dan PGDS Kemenkes sesuai dengan usulan dari Kab/Kota.

2.3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan kesehatan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul di masa yang akan datang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis lingkungan eksternal yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan pendek, menengah dan jangka panjang suatu daerah.

Isu Strategis di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- a. Peningkatan Usia Harapan Hidup;
- b. Penurunan jumlah kematian ibu dan bayi;

- c. Penurunan angka Stunting pada Balita;
- d. Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak Menular;
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat pada masyarakat melalui **GERMAS**;
- f. Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS);
- g. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan;
- h. Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan;
- i. Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan Kesehatan;
- j. Peningkatan kesehatan lingkungan sehat;
- k. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2026, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 meliputi :

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan);
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat.

3.2 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan kebutuhan, pada tahun 2026 dan mengacu kepada Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020, maka untuk tahun anggaran 2026 telah disusun sebanyak 5 program, 18 kegiatan dan 60 subkegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta untuk mencapai indikator dan target program kesehatan yang telah ditentukan. Total Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2026 untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 493.358.555.875.-

Kegiatan kesehatan pada tahun 2026 yang disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Kode dan Nama Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2026**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.1.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.1.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
2.1.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.01	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Provinsi
3.1.02	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4.1.01	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5.1.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

3.3 Indikator Sasaran

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, ada 3 sasaran yang ingin dicapai dan telah dilengkapi dengan indikator beserta targetnya untuk masing-masing sasaran tersebut. Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut telah dijabarkan menjadi target kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya. Program dan kegiatan

yang disusun pada tahun anggaran 2026 telah mengacu kepada upaya untuk mencapai seluruh sasaran tersebut.

Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Indikator
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1	Usia Harapan Hidup	74,71	Bid. Kesehatan Masyarakat
			2	Prevelensi Stunting	13,8	Bid. Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	109	Bid. Kesehatan Masyarakat
			2	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	98,5	Bid. Pelayanan Kesehatan
			3	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)	90	Bid. P2P
			4	Persentase obesitas >18 tahun	23,4	Bid. P 2P
			5	Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	95	Bid. P 2 P
			6	Persentase Kab/ Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	11,7	Bid. Kesehatan Masyarakat
			7	Angka Kematian Balita	13,8	Bid. Kesehatan Masyarakat
			8	Angka Kematian Bayi	11,63	Bid. Kesehatan Masyarakat
			9	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	82	Bid. Kesehatan Masyarakat
			10	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	55	Bid. Kesehatan Masyarakat
			11	Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	50	Bid. Kesehatan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			12	Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	90	Bid. P 2 P
			13	Angka Kematian (CFR) Dengue	0,4	Bid P 2 P
			14	Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%	17	Bid. P 2 P
			15	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta	2	Bid P 2 P
			16	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	90	Bid P 2 P
			17	Persentase hipertensi dalam pengendalian	25	Bid P 2 P
			18	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	1,4	Bid P 2 P
			19	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	11,4	Bid P 2 P
			20	Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	50	Bid P 2 P
			21	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	4	Bid. P 2 P
			22	Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%	95	Bid. P 2 P
			23	Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	87	Bid P 2 P
			24	Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	100	Bid. P 2 P
			25	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	100	Bid. P 2 P
			26	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang	100	Bid. P 2 P

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
				yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		
			27	Jumlah Kab / kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I	87	Bid. P 2 P
			28	Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	93	Bid. Kesehatan Masyarakat
			29	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	84	Bid. Kesehatan Masyarakat
			30	Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	50	Bid. Pelayanan Kesehatan
			31	Cakupankepesertaan aktif JKN	94	Bid. Pelayanan Kesehatan
			32	Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	60	Bid. Kesehatan Masyarakat
			33	Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	44	Bid. Pelayanan Kesehatan
			34	Persentase Lanjut Usia Mandiri	77	Bid. Kesehatan Masyarakat
			35	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	52,94	Bid. Kesehatan Masyarakat
			36	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	52	Bid. Kesehatan Masyarakat
			37	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	52,94	Bid. Kesehatan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			38	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	80	Bid. Kesehatan Masyarakat
			39	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	92	Bid. Kesehatan Masyarakat
			40	Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	15	Bid. Kesehatan Masyarakat
			41	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	65	Bid. Kesehatan Masyarakat
			42	Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	12	Bid. Kesehatan Masyarakat
			43	Persentase Kab/ Kota dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis > 80%	12	Bid. Kesehatan Masyarakat
			44	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	12	Bid. Pelayanan Kesehatan
			45	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	12	Bid. Pelayanan Kesehatan
			46	Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	65	Bid. Pelayanan Kesehatan
			47	Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	74	Bid. Kesehatan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			48	Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	85	Bid. Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	50	Bid. Pelayanan Kesehatan
			2	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	86	Bid. Pelayanan Kesehatan
			3	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	5	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	86	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			5	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	30	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			6	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	78	Bid. Pelayanan Kesehatan
			7	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	80	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			8	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	71	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			9	Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	27	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			10	Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	18	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			11	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	80	Bid. Sumber Daya Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	75	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			13	Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	92	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			14	Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	70	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			15	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	65	Bid. Pelayanan Kesehatan
			16	Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	50	Bid. Pelayanan Kesehatan
			17	Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas	80	Bid. Pelayanan Kesehatan
			18	Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	80	Bid. Pelayanan Kesehatan
			19	Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	4	Bid. Pelayanan Kesehatan
			20	Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	75	Bid. Pelayanan Kesehatan
			21	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	22	Bid. Sumber Daya Kesehatan
			22	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	47	Bid. Sumber Daya Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
		Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	1	Indeks Keluarga Sehat	0,345	Bid. Pelayanan Kesehatan
			2	Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	50	Bid. Kesehatan Masyarakat
			3	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.	30	Bid. Kesehatan Masyarakat
			4	Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	40	Bid. Kesehatan Masyarakat
			5	Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	20	Bid. Kesehatan Masyarakat
			6	Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	20	Bid. Kesehatan Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Program

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rincian Rancangan Anggaran per-Program dan Kegiatan
Bersumber Dana APBD pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9
		DINAS KESEHATAN			493.358.555.875,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			493.358.555.875,00
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			493.358.555.875,00
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			262.794.657.000,00
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.395.100.000,00
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	1.395.100.000,00
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	224.828.857.000,00
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1432 Orang/ Bulan	224.028.857.000,00
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	650.000.000,00

	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	150.000.000,00
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	190.000.000,00
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	190.000.000,00
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	840.000.000,00
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	234 Orang	750.000.000,00
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	234 Orang	90.000.000,00
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.650.000.000,00
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	250.000.000,00
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	450.000.000,00

	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	600.000.000,00
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	400.000.000,00
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	5.000.000,00
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	1.410.000.000,00
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	535.000.000,00
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.400.000.000,00
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	15 Paket	900.000.000,00
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	140 Unit	2.500.000.000,00
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.140.700.000,00

	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	10.000.000,00
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	3.500.000.000,00
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	5 Laporan	8.630.700.000,00
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.850.000.000,00
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit	1.800.000.000,00
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	10.600.000.000,00
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	450.000.000,00
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.500.000.000,00
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	3.500.000.000,00

2,	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			227.136.128.875,00
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	31.100.000.000,00
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>	90 Unit	200.000.000,00
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	90 Dokumen	900.000.000,00
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	100 Paket	30.000.000.000,00
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	194.182.448.875,00
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar</i>	100% Orang	850.000.000,00
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	100% Orang	850.000.000,00

	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</i>	1 Dokumen	950.000.000,00
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif</i>	1 Dokumen	300.000.000,00
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut</i>	1 Dokumen	125.000.000,00
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	1 Dokumen	750.000.000,00
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	1 Dokumen	300.000.000,00
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	10 Dokumen	1.650.000.000,00
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	1 Dokumen	125.000.000,00
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	2 Dokumen	125.000.000,00

	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	15 Dokumen	1.900.000.000,00
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>	1 Dokumen	214.175.000,00
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>	1 Dokumen	70.000.000,00
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	1 Dokumen	179.999.254.000,00
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	1 Dokumen	450.000.000,00
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	325.554.000,00
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</i>	4 Dokumen	952.173.875,00
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas</i>	1 Dokumen	450.000.000,00

	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	225.000.000,00
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
			<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	30 Unit	750.000.000,00
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	3 Dokumen	2.321.292.000,00
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan</i>	1 Dokumen	400.000.000,00
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
			<i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i>	100 Keluarga	100.000.000,00
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	528.680.000,00
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	1 Dokumen	528.680.000,00
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.325.000.000,00

	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
			<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>	100 Unit	75.000.000,00
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			
			<i>Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</i>	100 Unit	500.000.000,00
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>	100 Unit	750.000.000,00
3,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			577.770.000,00
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	102.770.000,00
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	100 Orang	55.000.000,00
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi</i>	100 Orang	47.770.000,00
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	475.000.000,00
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			

			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	100 Orang	75.000.000,00
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	1 Dokumen	400.000.000,00
4,	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.000.000.000,00
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	1.000.000.000,00
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
			<i>Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan</i>	37 Sarana	1.000.000.000,00
5,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.850.000.000,00
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	850.000.000,00
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	5 Dokumen	850.000.000,00
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.000.000.000,00
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	3 Dokumen	1.000.000.000,00
	J U M L A H				493.358.555.875,00

BAB V PENUTUP

Dengan ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja) Tahun 2026 dapat disusun. Renja - SKPD disusun dengan mengacu pada RPJMD, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja - SKPD ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2026. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan.

Penghargaan yang setinggi - tingginya, tentunya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.

Palembang, 28 November 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M. Kes., Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008